



Laporan RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SPPMHKP Palangka Raya 2025-2029



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
SPPMHKP PALANGKA RAYA

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya, **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PALANGKA RAYA 2025-2029** dapat diselesaikan. Rencana Strategis Stasiun PPMHKP Palangka Raya (Renstra Stasiun PPMHKP Palangka Raya) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan sesuai dengan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Rencana Strategis ini disusun diseleraskan dengan Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029 dibidang Kelautan dan Perikanan adalah ***“Terwujudnya Transformasi Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Kesejahteraan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”***.

Sebagaimana tindak lanjut amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP No.5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, Renstra Stasiun PPMHKP Palangka Raya 2025-2029 juga sebagai acuan perencanaan dan kegiatan pembangunan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.

Komitmen, konsistensi dan kerja gembira jajaran Stasiun PPMHKP Palangka Raya dan dukungan dari semua pihak baik instansi terkait ataupun pengguna layanan dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan adalah penting dan strategis, yang pada akhirnya misi BPPMHKP dalam Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; Peningkatan Kontribusi Ekonomi Biru Terhadap Perekonomian Nasional Sebagai Sumber

Pertumbuhan Baru; Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas segala masukan dan sumbangsih pemikiran semua pihak sehingga Rencana Strategis dapat disusun. Semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.

Palangka Raya, 29 Juni 2026
Kepala Stasiun PPMHKP Palangka Raya

Aris Sugiarto, S.Pi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL.....	4
BAB I	4
PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Kondisi Umum.....	5
1.3 Capaian Kinerja.....	6
1.4 Potensi dan Tantangan	8
1.5 Lingkungan Strategis	14
BAB II	18
VISI MISI,TUJUAN DAN SASARAN STATEGIS.....	18
2.1 Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan.....	18
2.2 Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan	18
2.3 Tujuan Strategis	20
2.4 Sasaran strategis	20
BAB III	23
Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan	23
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi.....	24
3.2. Kerangka Regulasi.....	25
3.3. Kerangka Kelembagaan.....	26
BAB IV.....	29
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	29
4.1 Target Kinerja	29
4.2 Kerangka Pendanaan.....	29
BAB V.....	32
PENUTUP	32

DAFTAR TABEL

1. Capaian Kinerja SPPMHKP Palangka Raya TA 2024.....	7
2. Rekapitulasi penyerapan anggaran SPPMHKP Palangka Raya TA 2024.....	9
3. Analisis Faktor dalam Lingkungan Strategis Internal BPPMHKP.....	16
4. Analisis Faktor dalam Lingkungan Strategis Eksternal BPPMHKP.....	17
5. Indikator Kinerja Stasiun PPMHKP Palangka Raya Tahun 2025-2029.....	30
6. Alokasi anggaran SPPMHKP Palangka Raya Tahun 2025.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan strategis menjadi bagian penting dalam pembangunan Nasional, di mana perencanaan strategis menjadi pedoman memberikan arah dalam melaksanakan program pembangunan, kegiatan dan aktivitas yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Dengan demikian, perencanaan pembangunan merupakan proses penyusunan tahapan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palangka Raya (Stasiun PPMHKP Palangka Raya) sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai panduan dan pedoman dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, BPPMHKP maupun oleh Stasiun PPMHKP Palangka Raya. Renstra merupakan dokumen perencanaan periode 5 tahunan yang

memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Stasiun PPMHKP Palangka Raya serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) serta bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Stasiun PPMHKP Palangka Raya Tahun 2025-2029 dilatar belakangi untuk menjalankan amanat yang ditetapkan oleh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang termuat dalam RPJM Kementerian Kelautan dan Perikanan dan mengakomodir tugas pokok dan fungsi Stasiun PPMHKP Palangka Raya.

1.2 Kondisi Umum

Berdasarkan kedudukan, tugas, dan fungsinya maka Stasiun PPMHKP Palangka Raya merupakan bagian dari suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan. Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan pada perencanaan pembangunan jangka panjang 2025-2029 adalah untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan yang sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya dalam tahapan pembangunan kelautan dan perikanan pada RPJMN 2025-2029 diarahkan untuk mewujudkan sektor kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung penggerak pembangunan ekonomi nasional.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai instrumen perlindungan sumberdaya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk-produk perikanan maka peranan strategis pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam melindungi kelestarian sumberdaya perikanan dari menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan, serta mengendalikan impor hasil perikanan berbasis *scientific barrier* sesuai ketentuan peraturan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Dengan demikian peranan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palangka Raya merupakan bagian integral dari Badan Pengendalian dan

Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, sebagai unit Eselon I dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan.

1.3 Capaian Kinerja

Capaian Kinerja SPPMHKP Palangka Raya pada Tahun 2024 ini menunjukkan pencapaian yang semakin baik pada masing-masing sasaran strategis, hal ini dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1. Capaian Kinerja SPPMHKP Palangka Raya Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	70 %	100 %	142 %
2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	70 %	100 %	142 %
3	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	70 %	83,1 %	119 %
4	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun	3.36	3.36	100 %

	KIPM Palangka Raya			
5	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya	86	86,71	100,8 %
6	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya	82	82,5	100,6 %
7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya	71	100	140 %
8	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya	93,76	98,31	104 %
9	Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya	100 %	100 %	100 %
10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya	80 %	100 %	125 %
11	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya	80 %	84,34 %	105,25 %
12	Tingkat kepatuhan BMN lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya	80 %	97,5 %	121 %

Alokasi Anggaran Stasiun PPMHKP Palangka Raya pada Tahun 2024 sebesar Rp. 3.375.704.000. Realisasi penyerapan anggaran SPPMHKP Palangka Raya mencapai Rp. 3.358.959.597 atau sebesar 99,50%. Rekapitulasi penyerapan anggaran SPPMHKP Palangka Raya TA 2024 berdasarkan jenis kegiatan adalah sebagai tabel 2 berikut :

No	Uraian Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pengendalian Mutu	128.000.000	120.746.504	94,33
2	Manajemen Mutu	126.000.000	118.869.375	94,34
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	3.121.704.000	3.119.343.718	99,92
4	Total	3.375.704.000	3.358.959.597	99,50

1.4 Potensi dan Tantangan

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi dan daya saing. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian,

kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan di tahun 2025 menetapkan angka target pertumbuhan ekonomi 5,3-5,6 %, nilai tukar nelayan 105-108, produksi garam 2,25 juta ton, luas kawasan konservasi 30 juta Ha, meningkatnya produksi ikan dari kegiatan budidaya menjadi 24,58 Juta ton dengan pertumbuhan ekspor perikanan USD 6,25 Miliar USD per tahun, pada tahun 2025 yang ditetapkan dalam RPJMN 2025 – 2029.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025 – 2029 Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menempatkan globalisasi perekonomian, pasar bebas regional dan dunia serta liberalisasi perdagangan merupakan faktor strategis lingkungan eksternal yang dapat menjadi peluang dan tantangan dalam pembangunan kelautan dan perikanan ke depan. Komitmen-komitmen dalam the World Trade Organization (WTO) untuk menurunkan bentuk-bentuk proteksi baik tarif maupun non-tarif perdagangan mengandung kesempatan sekaligus tantangan. Bagi negara yang mampu meningkatkan daya saingnya, berkesempatan untuk memperbesar pangsa pasarnya baik di pasar internasional maupun di pasar domestik. Sebaliknya negara-negara yang tidak mampu meningkatkan daya saingnya akan terdesak oleh para pesaingnya.

Dalam upaya menjalankan tugasnya sebagai komponen otoritas kompeten, sertifikasi, official control, BPPMHKP mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi salah satu unsur pendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan serta pengawasan kepada para stakeholders. Namun terdapat juga beberapa tantangan yang harus diantisipasi, agar tidak mengganggu upaya BPPMHKP guna memenuhi target kinerja, melakukan pengawasan, dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, serta optimalisasi PNBK-BPPMHKP.

Beberapa potensi dan tantangan yang akan dihadapi oleh Stasiun PPMHKP Palangka Raya dapat berasal dari internal maupun eksternal. Potensi dan tantangan Stasiun PPMHKP Palangka Raya dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya adalah sebagai berikut:

1. Stasiun PPMHKP Palangka Raya Dalam Mendukung Industrialisasi

Perikanan Yang Bernilai Tambah Dan Berdaya Saing. Potensi Stasiun PPMHKP Palangka Raya dalam rangka mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, antara lain :

- a. Implementasi kebijakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah **terkait kewenangan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan kewenangan pusat. Stasiun PPMHKP Palangka Raya bertanggung jawab untuk menjaga *food safety* produk perikanan nasional.** Keamanan pangan (*food safety*) diartikan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan memberikan **peran BPPMHKP untuk mampu merumuskan standar- standar dan sertifikasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk menaikkan daya saing produk indonesia di pasar internasional.**
- c. **Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017** Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan peluang BPPMHKP untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, melalui penyediaan pangan sehat **dengan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan melalui pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanannya dari residu dan bahan berbahaya.**
- d. Besarnya peluang ekspor karena kebutuhan konsumsi dunia produk perikanan yang semakin meningkat karena adanya perubahan pola konsumsi pangan dari daging merah ke daging putih (ikan) membuka peluang terhadap tingkat konsumsi produk perikanan pada masyarakat dunia.
- e. Meningkatnya kepercayaan dunia terhadap produk perikanan

nasional. Kepercayaan dunia akan produk perikanan nasional akan memperkuat daya saing dan dapat mempertahankan pangsa pasarnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian produk dengan permintaan, ketersediaan pasokan produk, dan pengiriman produk tepat jumlah dan tepat waktu.

- f. Meningkatnya peran teknologi dalam mendukung kegiatan operasional penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

Tantangan yang dihadapi BPPMHKP dalam mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, diantaranya :

- a. Jaminan kualitas dan keamanan produk perikanan masih rendah akibat rendahnya penerapan praktik *Good Handling Practices* (GHdP)/PMMT/Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada aktivitas budidaya ataupun penangkapan hingga penanganan di industri, fasilitas penanganan perikanan yang dipasok untuk industri, serta kurangnya penerapan sanitasi pada pekerja, peralatan penanganan perikanan dan lingkungan sehingga mengakibatkan pencemaran residu atau mikroba, penggunaan obat dan bahan berbahaya (formalin) yang dilarang untuk pangan (*misuse*) serta penggunaan bahan tambahan pangan secara berlebihan atau melampaui batas maksimum yang diizinkan (*abuse*).
- b. Persyaratan ekspor semakin ketat, dengan semakin ketatnya standar internasional kesehatan dan keamanan pangan, ketertelusuran, dan persyaratan pengujian spesifik seperti bebas radio aktif atau bebas dari hepatitis A. Uni Eropa mewajibkan sertifikasi hasil tangkapan (*catch certificate*). Hal ini mengacu kepada ketentuan Council Regulation (EC) Nomor 1005/2008 tanggal 28 September 2009 mengenai *establishing a Community system to prevent, deter, and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing*.

2. **Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produk Perikanan** dalam rangka mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif. Potensi yang ada di Stasiun PPMHKP Palangka Raya dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu produk perikanan Hulu-

Hilir antara lain :

- a. Pengembangan analisis risiko mutu dan keamanan hasil perikanan;
- b. Peningkatan peran tugas dan fungsi dalam pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang mencakup wilayah kerjanya;
- c. Penguatan kerjasama dengan Bea dan Cukai dan Badan Karantina Indonesia dalam membantu pengawasan ekspor, impor komoditas perikanan serta pengembangan *joint inspection* untuk memperlancar arus barang di pelabuhan utama;
- d. Komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang kuat dengan instansi dan lembaga lain yang terkait untuk memperkuat pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan ekspor, impor.

Tantangan yang dihadapi Stasiun PPMHKP Palangka Raya dalam pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan, diantaranya :

- a. Luasnya cakupan wilayah pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan dibandingkan dengan ketersediaan sumber daya aparatur dan sarana prasarana baik kualitas maupun kuantitas;
- b. Meningkatnya jumlah komoditas ekspor perikanan yang diatur tata niaganya yang harus disertifikasi sistem jaminan mutu hulu hilir, akan menjadi tantangan tersendiri;

3. Pelayanan Sertifikasi Mutu Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP). Potensi Stasiun PPMHKP Palangka Raya dalam tema pelayanan sertifikasi kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan, diantaranya :

- a. Pelayanan sertifikasi SMKHP melalui inspeksi, verifikasi/penilaian kesesuaian, dan penerbitan sertifikat mutu keamanan hasil perikanan dilaksanakan atas dasar profesionalisme dan kompetensi yang diakui validitas hasil ujinya/yang terakreditasi, terikat dengan janji waktu layanan kepada pelaku usaha perikanan untuk peningkatan pelayanan publik yang prima;
- b. Inovasi dalam pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan layanan masyarakat perikanan melalui adopsi penggunaan teknologi dan informasi

yang mudah, cepat, dan murah biaya operasionalnya, tanpa mengesampingkan mandat dalam tugas dan wewenangnya dengan tetap menjunjung tinggi standar pelayanan publik dan integritas, seperti pengembangan SIAP MUTU;

- c. Dalam menjalankan fungsi pelayanan, telah mengadopsi standar acuan internasional yaitu sistem mutu SNI-ISO/IEC 17025 yang terkait dengan kompetensi laboratorium yaitu kompetensi personel, kompetensi peralatan, kondisi prasarana dan sarana laboratorium dalam menunjang terlaksananya operasional pengujian yang sesuai panduan yang dipersyaratkan, untuk mendapatkan output hasil uji yang valid dan memenuhi standar nasional atau standar internasional. Pengakuan kompetensi diperoleh dengan mendapatkan label akreditasi;
- d. Standar sistem mutu lainnya yaitu SNI-ISO/IEC 9001 merupakan sistem mutu terkait dengan pemenuhan kesesuaian persyaratan atas pengelolaan manajemen untuk menghasilkan output produk yang sesuai persyaratan dimana pengakuan pemenuhan kesesuaian persyaratan pengelolaan manajemen melalui sertifikasi;
- e. Sedangkan SNI-ISO/IEC 17020 merupakan suatu standar sistem mutu yang diberlakukan pada lembaga inspeksi terkait dengan persyaratan kompetensi untuk melakukan penilaian kesesuaian. Pengakuan kompetensi diperoleh dengan mendapatkan label akreditasi, dan SNI-ISO/IEC 37001 adalah standar yang merinci persyaratan dan menyediakan panduan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, meninjau guna meningkatkan sistem manajemen anti penyuapan dimana pengakuan pemenuhan kesesuaian persyaratan pengelolaan manajemen melalui sertifikasi.

Tantangan yang dihadapi Stasiun PPMHKP Palangka Raya ke depan dalam memberikan pelayanan sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, diantaranya:

- a. Meningkatnya harapan masyarakat akan kualitas pelayanan yang tinggi, efektif, dan efisien, sementara sumber daya yang ada cukup terbatas;
- b. Mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan dan standar manajemen mutu yang tinggi kepada stakeholders;
- c. Mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha.

1.5 Lingkungan Strategis

BPPMHKP memiliki mandat untuk menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang dilakukan melalui pelaksanaan fungsi utama (1) penyusunan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; (2) pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; (3) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Hal tersebut harus didukung dengan rencana strategis yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis agar memberikan pengaruh positif terhadap pencapaian kinerja pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia melalui pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Untuk mencapai tujuan strategisnya, BPPMHKP harus mempertimbangkan faktor lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, guna memastikan efektivitas kebijakan dan program yang dijalankan. Lingkungan strategis yang mempengaruhi kinerja BPPMHKP dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal.

A. Faktor Strategis Lingkungan Internal

Dari perspektif lingkungan, faktor keberlanjutan dalam produksi perikanan juga menjadi aspek penting. Variabilitas kepatuhan terhadap standar mutu di berbagai daerah dapat dikaitkan dengan isu keberlanjutan lingkungan yang beragam, sehingga memerlukan pendekatan berbasis ekoregion dalam implementasi kebijakan perikanan. Selain itu, efektivitas layanan antar-UPT juga memiliki dampak terhadap pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Pendekatan strategis yang digunakan oleh BPPMHKP adalah melalui inovasi nilai dengan mendorong organisasi untuk menjauh dari kompetisi ketat di pasar yang sudah jenuh dan menciptakan ruang pasar baru yang belum tergarap melalui inovasi nilai. Pendekatan ini menjadi penting untuk merevolusi cara pandang terhadap mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan Indonesia, agar tidak sekadar bertahan dalam kompetisi, tetapi menjadi pelopor perubahan. Pada tabel dibawah ini dapat dilihat faktor, inovasi nilai dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan strategis internal.

Tabel 3. Analisis Faktor dalam Lingkungan Strategis Internal BPPMHKP

Dimensi	Faktor	Inovasi Nilai	Tantangan
Ekonomi	Daya saing produk perikanan global	Pengembangan standar mutu nasional yang proaktif dan terintegrasi dengan pasar global melalui platform digital	Ketergantungan pada regulasi ekspor pihak luar
	Ekspansi Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Menjadikan UPI sebagai agen perubahan dengan orientasi ecolabel dan inovasi hijau	Persaingan harga antar negara eksportir
Sosial	Sertifikasi & Pengawasan	Digitalisasi sistem sertifikasi berbasis blockchain untuk memperkuat traceability dan transparansi	Sistem sertifikasi konvensional yang lambat dan mahal
	Kualitas layanan publik	Penerapan sistem feedback pelanggan secara real-time berbasis AI untuk peningkatan kualitas layanan	Ketimpangan layanan antar wilayah
	Kompetensi petugas	Platform pelatihan mikro (microlearning) nasional berbasis daring dan berkelanjutan	Ketergantungan pada pelatihan manual dan musiman
Lingkungan	Kepatuhan standar mutu	Sertifikasi mutu berbasis ekoregion yang relevan dengan kondisi lokal dan berbasis digital	Standarisasi nasional yang belum adaptif terhadap keragaman lokal
	Efektivitas layanan UPT	Klasterisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) berbasis keunggulan	Kinerja layanan tidak merata di seluruh wilayah

	ekosistem dan layanan	
--	-----------------------	--

Faktor internal BPPMHKP menunjukkan potensi besar untuk transformasi jika diarahkan melalui lensa inovasi nilai. Misalnya, sistem sertifikasi yang sebelumnya dianggap lamban dapat diubah menjadi sistem berbasis blockchain yang cepat, transparan, dan ramah pengguna. Kompetensi SDM yang terfragmentasi dapat ditingkatkan dengan platform microlearning daring yang menjangkau seluruh Indonesia. Pendekatan inovasi nilai dapat mengubah cara memandang kekurangan bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai ladang inovasi.

B. Faktor Strategis Lingkungan Eksternal

Berdasarkan perspektif lingkungan, perubahan iklim menjadi ancaman nyata terhadap produksi perikanan. Cuaca ekstrem dan kerusakan ekosistem dapat memengaruhi ketersediaan bahan baku, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam produksi dan distribusi. Sementara itu, tekanan persaingan global dan perubahan regulasi internasional yang semakin ketat memaksa Indonesia untuk terus meningkatkan standar mutu dan inovasi dalam industri perikanan. Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, tabel di bawah merangkum faktor-faktor eksternal berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari masing-masing faktor. Berdasarkan Tabel 6, faktor eksternal bukan semata-mata ancaman, tetapi justru merupakan katalis bagi pembaruan sistem. Di tengah penurunan ekspor ke negara tujuan lama, BPPMHKP dapat membuka pasar baru yang lebih menghargai nilai keberlanjutan. Kebutuhan terhadap traceability dan transparansi juga membuka ruang untuk teknologi blockchain dan IoT yang dapat menurunkan beban UKM dalam memenuhi persyaratan ekspor.

Tabel 4. Analisis Faktor dalam Lingkungan Strategis Eksternal BPPMHKP

Dimensi	Faktor	Inovasi Nilai	Tantangan
	Penurunan negara tujuan ekspor	Diversifikasi pasar berbasis nilai keberlanjutan seperti eco-conscious, traceable, zero waste	Ketergantungan pada pasar tradisional
		Kolaborasi regional	Tergantung pada

Ekonomi	Kesenjangan registrasi UPI	dalam harmonisasi standar registrasi dan sistem pengakuan lintas negara	kebijakan bilateral
	Regulasi internasional	Pengembangan standar nasional adaptif berbasis AI untuk proyeksi regulasi global	Reaktif terhadap perubahan regulasi internasional
Sosial	Inovasi pengawasan	Digitalisasi audit mandiri oleh pelaku usaha berbasis platform daring	Sentralisasi sistem pengawasan yang kaku
	Sistem traceability	Integrasi teknologi IoT dan blockchain untuk membangun traceability inklusif bagi semua pelaku usaha	Sistem konvensional yang memberatkan UKM
Lingkungan	Perubahan iklim	Penerapan data lingkungan dan model prediktif untuk mitigasi dampak iklim terhadap produksi	Ketergantungan pada musim

BAB II

VISI,MISI,TUJUAN DAN SASARAN STARTEGIS

2.1 Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2025-2029 adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.” Visi ini mencerminkan aspirasi bangsa untuk menjadi negara maju dengan Pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan menjelang peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Sebagai salah satu organisasi pemerintah yang memiliki tanggung jawab strategis dalam sektor kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen mendukung tercapainya visi tersebut melalui perencanaan yang terintegrasi dan implementasi kebijakan yang efektif. Untuk periode 2025-2029, visi KKP ditetapkan sebagai “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.” Visi ini menegaskan pentingnya keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung perekonomian sekaligus upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada sektor ini.

Sejalan dengan visi nasional dan kementerian, BPPMHKP merumuskan visinya sendiri untuk periode yang sama, yaitu dengan mengacu pada beberapa isu yang menjadi perhatian Presiden yang tertuang dalam Asta Cita, antara lain yang terkait dengan (1) meningkatkan gizi anak melalui makan bergizi gratis; (2) swasembada pangan menuju lumbung pangan dunia dan (3) hilirisasi komoditas.

2.2 Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2025-2029, Kementerian Kelautan dan Perikanan terutama melaksanakan 7 (tujuh) dari 8 (delapan) misi (Asta Cita)Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Misi ke-2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki peran strategis dalam memperkuat Kawasan sentra produksi pangan berbasis kelautan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Digitalisasi data pangan menjadi elemen kunci untuk efisiensi distribusi dan pengelolaan pangan. Selain itu, pengembangan pangan lokal berbasis laut seperti ikan dan rumput laut diiringi biofortifikasi dan fortifikasi pangan untuk meningkatkan nilai gizi. Peningkatan produktivitas perikanan, pengembangan pelabuhan perikanan modern, dan armada tangkap di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) menjadi prioritas utama. Pengembangan pangan akuatik juga mendukung ketahanan pangan lokal dan nasional, sejalan dengan prinsip keberlanjutan ekonomi biru.
2. Misi ke-3: Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, dan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur. Destinasi wisata berbasis laut seperti Bali, Kepri, dan Lombok harus dimanfaatkan sebagai pendorong ekonomi daerah dan pencipta lapangan kerja baru. Inovasi dalam pengolahan hasil laut perlu didorong untuk meningkatkan nilai tambah dan akses pasar bagi masyarakat pesisir.
3. Misi ke-4: Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas. Penyiapan tenaga kerja terampil melalui pendidikan vokasi relevan dengan kebutuhan industri. Selain itu, program makan bergizi berbasis ikan mendukung pengentasan stunting dan menciptakan generasi produktif.
4. Misi ke-5: Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri. Fokus pada pengolahan rumput laut menjadi produk bernilai tinggi seperti kosmetik, pangan olahan, dan bahan baku industri. Penguatan logistik dan distribusi menjadi kunci daya saing produk perikanan di pasar global (Susanto & Wibowo, 2021).
5. Misi ke-6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan. Usaha perikanan lokal seperti budidaya ikan dan

pengolahan rumput laut menjadi pilar pemberdayaan ekonomi desa. Dengan akses ke pasar dan teknologi, masyarakat pedesaan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan secara inklusif.

6. Misi ke-7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba. Regulasi yang efisien dan transparan diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang baik di sektor kelautan, memastikan keberlanjutan sumber daya dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
7. Misi ke-8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar umat beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur. Restorasi mangrove dan terumbu karang serta penguatan resiliensi Masyarakat pesisir menjadi langkah mitigasi penting terhadap dampak perubahan iklim.

2.5 Tujuan Strategis

Mengacu pada rumusan Visi dan Misi BPPMHKP, maka Stasiun PPMHKP Palangka Raya menyusun langkah strategis yang mendukung pelaksanaan pelayanan dan operasional pengendalian dan pengawasan mutu perikanan yang dilandaskan pada makna dan kepentingan sebagai instrumen perlindungan terhadap kelestarian sumberdaya perikanan, pembangunan sistim dan usaha perikanan lokal/nasional yang berorientasi pada pasar global.

2.6 Sasaran Strategis

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2025- 2029, maka sasaran strategis (SS) dan kondisi outcome/impact yang diinginkan dapat dicapai Stasiun PPMHKP Palangka Raya dari program yang dilaksanakan, maka Stasiun PPMHKP Palangka Raya telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur dengan program dan sasaran semula yaitu:

- Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan sasaran program Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat.
- Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan sasaran program Terwujudnya pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel, dan berkelanjutan.
- Program Dukungan Manajemen dengan sasaran Program Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan BPPMHKP.

Menjadi :

- 1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan sasaran program Sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan yang berdaya saing.
- 2) Program Dukungan Manajemen dengan sasaran Program Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan BPPMHKP.

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan secara profesional dan partisipatif tahun 2025, dengan indikator kinerja :

- a) Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya sebesar 70%;
- b) Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya 70%;
- c) Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palangka Raya 99%;

Sasaran strategis yang akan dicapai dalam tujuan terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar, dengan indikator kinerja :

- a) Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya adalah 75.
- b) Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya adalah 75.

Sasaran strategis yang akan dicapai dalam tujuan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, dengan indikator kinerja :

- a) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya adalah 92.
- b) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya adalah 71,5.
- c) Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya adalah 100%.
- d) Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya adalah 87.
- e) Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya adalah 86.
- f) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya 85%
- g) Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya 76%
- h) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya 88.

BAB III

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 (ayat 3) menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada konteks pemenuhan amanat konstitusi tersebut, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan laut Indonesia dilakukan untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pada masa mendatang pembangunan ekonomi Indonesia akan bertumpu pada pemanfaatan hasil kelautan dan perikanan, terutama untuk keperluan penciptaan lapangan kerja, industri dan produksi barang/jasa, perdagangan, konservasi, lingkungan hidup, pertambangan, transportasi, dan pariwisata.

RPJMN 2025-2029 merupakan tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, yakni bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Terkait dengan penguatan daya saing perekonomian tersebut, diantaranya ditempuh melalui peningkatan pembangunan kelautan dan sumber daya alam lainnya sesuai dengan potensi daerah secara terpadu serta meningkatnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Misi ke-7 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2029 menyebutkan bahwa sasaran pembangunan kelautan adalah untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan pada kepentingan nasional. Indikator perwujudan sasaran pembangunan kelautan tersebut dilihat melalui : (1) terbangunnya jaringan sarana dan prasarana sebagai perekat semua pulau dan kepulauan Indonesia; (2)

meningkatnya dan menguatnya SDM di bidang kelautan yang didukung dengan pengembangan IPTEK; (3) ditetapkannya wilayah negara kesatuan NKRI, aset, dan hal-hal yang terkait dengan kerangka pertahanan negara; (4) terbangunnya ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan; dan (5) berkurangnya dampak bencana pesisir dan pencemaran laut.

1.1. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi memuat langkah-langkah yang berupa program-program indikatif untuk menyelesaikan masalah yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Program-program tersebut mencakup kegiatan- kegiatan prioritas dalam RPJMN yang sesuai dengan bidang kekarantinaan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi BPPMHKP. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi Stasiun PPMHKP Palangka Raya dalam rangka mendukung perwujudan arah RPJMN 2025-2029, visi misi Presiden, serta implementasi Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2025-2029 sebagai berikut:

1. Pengelolaan sumber daya perikanan secara berdaulat dan berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya harus dilakukan dengan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
2. Peningkatan daya saing dan nilai tambah produk perikanan sebagai upaya untuk pemantapan sistem jaminan mutu dan keamanan (*quality and safety assurance*) hasil perikanan melalui strategi
 - a. Pengembangan sistem pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar melalui:
 - Sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan
 - Sertifikasi kesehatan mutu ekspor yang memenuhi persyaratan negara tujuan
 - Registrasi Unit Pengolahan Ikan di negara mitra

- Penerapan sistem traceability rantai pasok bahan baku pada Unit Pengolahan Ikan (UPI)
 - Konsistensi penerapan sistem manajemen mutu (ISO 9001), sistem manajemen inspeksi (ISO 17020), dan sistem layanan laboratorium (ISO 17025)
- b. Harmonisasi sistem penjaminan Mutu yang Implementatif
- Harmonis sistem , perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara mitra (MoU/MRA) serta negara tujuan ekspor lainnya
 - Penyelesaian penanganan kasus ekspor hasil perikanan
3. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola, akan dilaksanakan melalui strategi :
- a. Pengelelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi (*Competency Based Human Resource Management*);
 - b. Perbaikan pelayanan publik melalui penerapan Standar Pelayanan;
 - c. Peningkatan kemudahan akses dan transparansi informasi publik;
 - d. Penerapan manajemen berbasis kinerja dan efektivitas pengelolaan anggaran.

1.2. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis BPPMHKP, akan disusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (RPermen KP) yang terkait dengan bidang tugas BPPMHKP pada periode 2025-2029. Rancangan peraturan tersebut sesuai dengan program penyusunan peraturan perundang-undangan setiap tahun pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sistem regulasi nasional merupakan suatu proses mekanisme bertahap untuk mewujudkan harmonisasi antara kebijakan yang dirumuskan kedalam bentuk regulasi melalui upaya pengelolaan yang terarah (perencanaan, koordinasi,

monitoring dan evaluasi) terutama dalam rangka meningkatkan kualitas regulasi dan kinerja penyelenggara Negara demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Dalam tataran praktis, kerangka regulasi akan meliputi pengaturan teknis pada sistem kerja yang mencakup penataan SDM, penyediaan SOP tata laksana pelayanan umum dan khusus dan juga pengaturan kerangka kelembagaan.

Penyusunan rancangan/draf peraturan perundang-undangan bidang mutu dan keamanan hasil perikanan bertujuan untuk memperkuat dan melengkapi ketentuan peraturan perundangan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui penyusunan rancangan atau revisi peraturan perundangan tentang pelaksanaan mutu dan keamanan hasil perikanan, evaluasi ketentuan mutu dan keamanan hasil perikanan, reviu dan pengumpulan ketentuan-ketentuan mutu dan keamanan hasil perikanan di negara mitra.

Namun harus dipahami bahwa kebijakan dan regulasi memiliki perbedaan yang berbeda, antara lain:

KEBIJAKAN	REGULASI
a. Pilihan tindakan diantara sejumlah alternatif tindakan.	1. Instrumen operasional dari tindakan yang terpilih.
b. Kebijakan terpilih tidak harus/selalu menjadi norma regulasi.	2. Regulasi selalu bersubstansikan kebijakan
c. Bebas norma.	3. Terikat norma, mengacu pada strata regulasi (tidak boleh ada konflik norma), harus konsisten dan harmonis dengan norma yang lain, dsb. Perlu kontrol dari aspek perencanaan kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi

1.3. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan adalah perangkat BPPMHKP berupa struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun berpedoman pada RPJM Nasional.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2023 tentang Organisasi Kementerian Negara adalah pengaturan mengenai pokok-pokok organisasi kementerian negara. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara ditetapkan dalam rangka mewujudkan organisasi kementerian negara yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Sebagai dasar hukum kelembagaan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Permen KP Nomor 05 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP, maka pembangunan BPPMHKP merupakan bagian dari suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan.

Peran Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan menjadi ujung tombak pembangunan usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya di hulu - hilir, yaitu sebagai instrumen perlindungan sumberdaya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk-produk perikanan. Peranan strategis BPPMHKP diwujudkan dalam melindungi kelestarian sumberdaya perikanan dalam menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan, serta mengendalikan impor hasil perikanan berbasis scientific barrier sesuai ketentuan peraturan mutu dan keamanan hasil perikanan. Dengan demikian peranan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun antar area di dalam wilayah Negara Indonesia. Dengan demikian peranan BPPMHKP memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palangka Raya, terdiri atas:

- a. Kepala Stasiun
- b. Kepala Sub Bagian Umum; mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional. Jabatan fungsional yang ada di Stasiun PPMHKP Palangka Raya antara lain : Inspektur Mutu, Asisten Inspektur Mutu, Arsiparis, Pengelola Keuangan, BMN dan Pranata Komputer.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja serta implementasi kinerja berdasarkan *Balanced Scorecard* (BSC), maka indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Indikator Kinerja Stasiun PPMHKP Palangka Raya Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU)		2025	2026	2027	2028	2029
SS-1.1 Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan						
1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya (%)	70	72	74	76	80
2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya (%)	70	72	74	76	80
3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT (%)	99	99	99	99	99
SK-2. Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar						
4	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya (Nilai)	75	75	75	75	75
5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya (Nilai)	75	75	75	75	75
6	Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil KP yang ditetapkan lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya (%)	70	72	74	76	78

SK-3. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan						
6	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya (Nilai)	92	92,1	92,15	92,2	92,2
7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya (Nilai)	71,5	81,75	82	82,25	82,5
8	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya (%)	100	100	100	100	100
9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya (Indeks)	82	82,5	83	83,5	84
10	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya (Nilai)	86	86,2	86,4	86,6	86,8
11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya (%)	85	86	87	88	89
12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya (%)	76	77	78	79	80
13	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya (%)	70	77	77,5	78	78,5
14	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT SPPMHKP Palangka Raya (Nilai)	3,36	3,5	3,64	3,78	3,92

4.2 Kerangka Pendanaan

Rencana Kerja Balai KIPM BKIPM tahun 2025 diarahkan untuk mencapai target- target kinerja pembangunan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan yang sudah ditargetkan. Alokasi anggaran pembangunan pada SPPMHKP Palangka Raya tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 3.894.542.000,-. Alokasi anggaran tersebut belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan pembangunan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Strategi kebijakan anggaran yang diterapkan oleh Stasiun PPMHKP Palangka Raya untuk mewujudkan target-target kinerja tersebut diantaranya dengan mereviu dan refokusing kembali kegiatan-kegiatan prioritas sehingga alokasi anggaran yang tersedia dapat efektif, efisien dan akuntabel. Alokasi anggaran per kegiatan pada program, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan SPPMHKP Palangka Raya dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Alokasi anggaran per kegiatan pada program pengendalian dan SPPMHKP Palangka Raya Tahun 2025.

No	Kegiatan	Anggaran (Jutaan)				
		2025	2026	2027	2028	2029
1.	Dukungan Manajemen Internal	3.397.237.	3.258.822	3.500.000	3.500.000	3.500.000
2.	Manajemen Mutu	405.604	141.176	150.000	150.000	150.000
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	91.701	80.750	100.000	100.000	100.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Stasiun PPMHKP Palangka Raya Tahun 2025-2029 merupakan suatu dokumen yang disusun sesuai dengan amanat Undang Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Strategis Stasiun PPMHKP Palangka Raya ini mengacu pada Rencana Strategis BPPMHKP 2025-2029.

Dengan adanya penyesuaian terhadap visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan Indikator Kinerja Utama (IKU), arah kebijakan dan strategi pembangunan kelautan dan perikanan yang tertuang dalam dokumen Renstra BPPMHKP 2025-2029, maka dokumen ini menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Stasiun PPMHKP Palangka Raya dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Stasiun PPMHKP Palangka Raya tahun 2025-2029.

Keberhasilan pelaksanaan kinerja BPPMHKP memerlukan adanya dukungan unit kerja terkait dan masyarakat luas. Komitmen dan kerja keras dari pimpinan dan seluruh pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) Stasiun PPMHKP Palangka Raya, serta sinergitas dengan semua pihak terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk menjadikan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.